



PERBANDINGAN TINGKAT KORUPSI DAN E-GOVERNMENT BERDASARKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Raihan Ramadhanito¹, Fajar Gustiawaty Dewi²

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 24 Maret 2025

Diterima: 22 April 2025

Terbit/Dicetak: 30 April 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan tingkat korupsi dan e-government antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat). Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian uji beda mann whitney u test. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat perbedaan pada tingkat korupsi dan e-government yang signifikan antara opini WTP dan selain WTP.

Keywords:

Korupsi, E-Government, Opini Laporan Keuangan

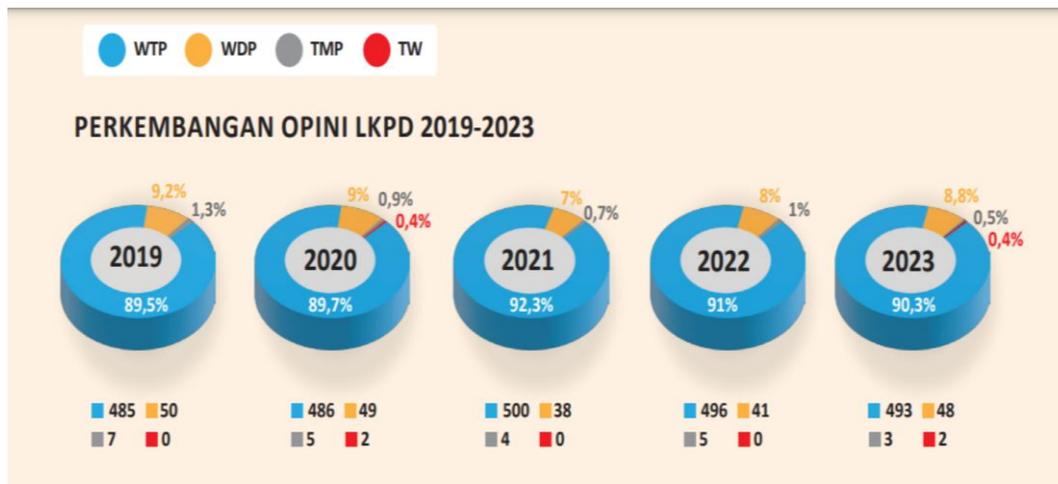
A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur konsistensi aktivitas pemerintahannya, dan perlu untuk mengamati segala potensi maupun masalah yang kelak akan dialami oleh daerah pemerintahannya. Namun, selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat daerahnya dan lembaga yang ada dalam daerah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan memberikan informasi yang transparan mengenai hasil-hasil aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat umum. Terkait wujud tanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 terkait keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan betapa pentingnya tanggungjawab dan kewajiban untuk melaporkan semua hasil kinerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan ke pemerintah pusat serta pemerintahan yang terlibat tersebut melaporkannya ke khalayak umum yaitu masyarakat. Pelaporan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka manifestasi akuntabilitas serta transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua pelaporan keuangan yang dikeluarkan mendapatkan pendapat kewajaran laporan keuangan (opini) yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Masih terdapat Provinsi/Kabupaten/Kota yang beberapa diantaranya belum mendapatkan opini WTP, namun masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), bahkan opini tidak wajar. Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini memperlihatkan bahwa Opini WTP yang ditetapkan BPK untuk pemerintah daerah meningkat dalam lima tahun terakhir, dari 89,5% di tahun 2019 menjadi 90,3% di tahun 2023.

* Corresponding Author.

Raihan Ramadhanito, e-mail : raihanramadhanito11@gmail.com



Gambar 1. Perkembangan opini LKPD tahun 2019 – 2023.
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester 1 tahun 2024

Meskipun perkembangan opini LKPD dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan WTP, namun pada level pemerintahan Provinsi mengalami penurunan opini di tahun 2023, dan pada level kabupaten lebih banyak yang mengalami penurunan WTP (sebanyak 17 kabupaten) dibandingkan kenaikan WTP (10 kabupaten). Oleh karena itu dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia.

Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks pemerintahan negara. Setiap tahun, masalah korupsi terus muncul dalam berbagai skala, meskipun pemerintah telah berusaha melawannya melalui pembentukan tiga lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut adalah Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022 yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2022:



Gambar 2. Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2022)

Meskipun perkembangan opini LKPD dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan WTP, namun pada level pemerintahan Provinsi mengalami penurunan opini di tahun 2023, dan pada level kabupaten lebih banyak yang mengalami penurunan WTP (sebanyak 17 kabupaten) dibandingkan kenaikan WTP (10 kabupaten). Oleh karena itu dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks pemerintahan negara. Setiap tahun, masalah korupsi terus muncul dalam berbagai skala, meskipun pemerintah telah berusaha melawannya.

Hubungan antara opini laporan keuangan dan korupsi seringkali menimbulkan perdebatan, namun berkaitan dengan opini laporan keuangan dengan kualitas tata kelola, disebutkan bahwa tata kelola yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi. Sehingga Ketika prinsip-prinsip diterapkan secara konsisten resiko korupsi dapat diminimalkan. Opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, bukan atas tindak pidana korupsi. Pemeriksaan lebih fokus bahwa laporan keuangan sudah tersaji sesuai standar. Sementara itu hubungan antara opini laporan keuangan dengan *E-Government* memiliki keterkaitan yang erat dengan menata kelola pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari transparansi dan akuntabilitas. Opini laporan keuangan yang baik (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. *E-Government* adalah elemen yang berpengaruh dalam melaksanakan sistem pemerintahan suatu negara sebagai tolak ukur apakah negara tersebut sudah baik (World Bank, 1996). Hal ini dikarenakan *E-Government* dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas sistem pemerintahan sehingga dapat menekan ketimpangan informasi yang sering terjadi antara Masyarakat dan pemerintah. *E-Government* adalah salah satu sistem akuntansi yang mendukung tercapainya praktik *good government governance*. Dengan *E-Government* diharapkan transparansi serta akuntabilitas di Indonesia dapat meningkat. Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 berisi kebijakan dan strategis nasional dalam mengembangkan *E-Government*, yang mengharuskan lembaga pemerintahan untuk merancang dan mengembangkan, serta mengimplementasikan *E-Government*, yang berperan sebagai wadah penyaluran informasi terhadap publik.

Penelitian terdahulu menyatakan penggunaan internet dalam pemerintahan akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Pontoh, 2018). Studi serupa tentang *E-Government* yang diukur melalui *Internet Financial Reporting (IFR)* oleh Juniantika et al (2020) menyatakan terdapat pengaruh opini audit (Kualitas laporan keuangan) terhadap *E-Government*. Artinya terdapat perbedaan *E-Government* berdasarkan kualitas laporan keuangan. Rodríguez-Navas (2019) menyatakan bahwa *E-Government* dapat menurunkan tingkat aktivitas korupsi dalam pemerintahan. Selanjutnya menurut Tsutskiridze (2020), *E-Government* efektif dalam menurunkan tingkat korupsi. Walaupun sebagian besar institusi sudah menerapkan *E-Government* namun korupsi masih sering ditemukan. Hal ini dikarenakan keberhasilan *E-Government* tidak dapat diterapkan secara universal. Terdapat faktor organisasi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas fungsi *E-Government* dalam melawan korupsi Rustiarini (2019).

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, sebagian besar kualitas laporan keuangan di Indonesia telah berkualitas baik dilihat dari opini WTP namun tingkat korupsi masih tinggi, padahal seharusnya sesuai dengan teori dan pernyataan riset sebelumnya oleh Kuntadi, et al. (2023) bahwa opini LKPD yang baik akan mengurangi korupsi. Hal ini merupakan alasan penulis untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dengan pemerintah daerah yang memiliki opini selain WTP. Selanjutnya atas dasar teori dan riset terdahulu menyatakan bahwa pelaporan yang lebih berkualitas berkaitan dengan peningkatan tata kelola atau *governance*. Namun berdasarkan fenomena sebelumnya yang dilihat dari data penilaian sistem pelaporan berbasis elektronik (SPBE) masih banyak pemda di Indonesia yang belum menerapkan *E-Government* secara maksimal. Hal ini yang menjadi perhatian utama penulis dalam menguji apakah terdapat perbedaan penerapan *E-Government* pada pemerintah daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pemerintah daerah yang memiliki opini selain WTP. Permasalahannya adalah: Apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi dan *E-Government* antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dengan opini selain WTP.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan membahas keterkaitan dua belah pihak, yaitu pemilik dan pengelola. Dalam konteks ini, principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola dan mengambil keputusan atas nama mereka. Teori ini penting dalam manajemen perusahaan karena mencakup dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Dalam pemerintahan, masyarakat sebagai principal memberikan wewenang kepada pejabat publik (agen) untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik. Hal ini menciptakan hubungan keagenan di mana agen diharapkan bertindak demi kepentingan rakyat.

Opini LKPD

Dalam konteks audit LKPD, terdapat beberapa level opini yang dikeluarkan oleh auditor, diantaranya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak menyatakan pendapat (TMP). Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan ketika auditor yakin bahwa penyajian LKPD telah wajar berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Sementara opini wajar dengan pengecualian (WDP) diberikan ketika auditor menemukan salah saji material dalam laporan keuangan tapi tidak memiliki dampak yang menyebar secara keseluruhan. Sedangkan opini tidak wajar (TW) diberikan ketika auditor menemukan salah saji material yang memiliki dampak secara keseluruhan. Selanjutnya opini tidak menyatakan pendapat (TMP) diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyatakan opini. Studi ini berdasar pada landasan teoritis yang mengatakan bahwa opini laporan keuangan memiliki peran yang penting terhadap pencegahan korupsi dalam pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa opini laporan keuangan yang baik seperti WTP dapat berperan sebagai alat pencegahan terhadap kegiatan korupsi. Merujuk pada PP No 71 tahun 2010 terkait standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan adalah laporan sistematis mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu Lembaga. Entitas pelaporan yang dimaksudkan ialah unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa substansi akuntansi dan memiliki sifat wajib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan (Nordian, 2012). Penelitian ini melibatkan konsep opini audit oleh BPK yang berperan sebagai alat ukur kualitas pelaporan keuangan. Dalam teori ini menyatakan bahwa jenis opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menandakan efektivitas praktik pelaporan keuangan mereka dan dapat menunjukkan kerentanan terhadap perilaku korupsi.

Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan individual yang mencakup berbagai perilaku, berupa suap hingga pencurian dana publik (World Bank, 1996). Korupsi dapat terjadi dimana saja, namun biasanya korupsi kerap terjadi di sebuah negara yang memiliki institusi yang lemah dan sering kali terdampak oleh kerapuhan dan konflik. Berdasarkan atas teori agensi menjelaskan bahwa korupsi adalah kecurangan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian informasi antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal (Bergman & Lane, 1990). Dimana pemerintah sebagai agent dinilai memiliki informasi yang lebih mengenai keadaan administrasi negara sehingga dianggap memiliki akses yang lebih dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindak kecurangan. Oleh sebab itu, dalam upaya menekan asimetri tersebut, pemerintah diharuskan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang dapat membuktikan tanggungjawab pemerintah dalam kenegaraan (Chen & Aklikokou, 2019). Korupsi sebagai suatu bentuk kecurangan atau fraud, berikut adalah 3 dorongan utama untuk melakukan Tindakan korupsi, diantaranya:

1. Tekanan Tekanan kerap kali menjadi motivasi yang menjadi alasan untuk melakukan tindak kecurangan. Tekanan yang terjadi dapat berasal dari empat hal yaitu tekanan finansial yaitu keserakahan, standar hidup yang tinggi, hingga lilitan hutang, selain itu tekanan dapat datang dari tekanan kebiasaan buruk atau kepribadian, hingga tekanan pekerjaan (Albrecht et al., 2011).
2. Peluang Peluang Korupsi merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Peluang ini kerap timbul atas kontrol internal yang lemah, pengawasan yang minim, serta penyalahgunaan jabatan kekuasaan. Peluang tidak hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan tertinggi karena peluang dapat diperoleh atas akses yang lebih atas informasi umum dan keterampilan teknis
3. Rasionalisasi Rasionalisasi merupakan sebuah pemikiran yang memberikan alasan untuk membenarkan tindakan korupsi serta kecurangan lainnya secara moral oleh Masyarakat (Cressey, 1950). Berdasarkan Undang Undang 31/1999 jo 20/201 bahwa kerugian keuangan negara termasuk dalam suatu jenis korupsi.

E-Government

E-Government merupakan bentuk dalam pelayanan public oleh pemerintah disaat melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kewajibannya dalam melayani kebutuhan informasi public dengan memanfaatkan sarana berbasis teknologi maupun internet dan teknologi digital lainnya (Setyaningrum, 2022). E-Government merupakan konsep pada sektor public baik yaitu pada pemerintahan pusat maupun

pemerintahan daerah yang dimana pemanfaatan teknologi informasi memiliki kaitan yang erat. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengoptimalkan pelayanan public secara efektif, transparan, efisien, serta akuntabel (Rohmatun et al., 2022). Tujuan dari penggunaan e-government dalam tata kelola pemerintah daerah di Indonesia adalah untuk administrasi pemerintahan yang terlaksana efisien dan efektif, dan agar dapat mencapai pelayanan publik yang bersifat transparan dan memuaskan. Di Indonesia salah satu bentuk proksi e-government adalah sistem pelaporan berbasis elektronik (SPBE). Pengukuran e-government menggunakan indeks SPBE juga dipakai pada penelitian sebelumnya oleh Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018) dan Wulandari & Bandi (2015).

Perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP

Penelitian Rini et al. (2015) menunjukkan bahwa opini yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Selanjutnya menurut Liu (2021) mengungkapkan bahwa transparansi memiliki paradoks di negara-negara berkembang, yang menekankan bahwa meskipun transparansi itu penting dan penerapannya harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari memfasilitasi korupsi secara tidak sengaja. Opini laporan keuangan diyakini memiliki kontribusi serta keterkaitan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah, namun belum banyak studi yang meneliti hal tersebut, salah satu studi yang meneliti pengaruh opini audit terhadap tingkat kasus suap dan korupsi adalah Avis et al. (2018) yang menyatakan bahwa area yang sudah mendapatkan opini audit cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah sekitar 8% jika dibandingkan dengan area yang belum mendapatkan opini audit. Berdasarkan penelitian oleh Kuntadi, et al. (2023) menunjukkan bahwa opini audit berperan besar dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Opini audit yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga berpotensi mengurangi tingkat korupsi. Publik mempertimbangkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK atas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu jika hal tersebut benar adanya maka seharusnya pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP oleh BPK seharusnya bebas dari masalah fraud atau korupsi. Tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus penyimpangan terutama korupsi yang marak terjadi dalam pemerintah daerah. Menurut Yudi et al. (2018). Adanya korelasi yang signifikan antara tingkat korupsi di kalangan kepala daerah dan opini yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Provinsi dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi cenderung menerima opini BPK yang kurang baik, sehingga hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap persepsi kinerja keuangan. Menurut Ruki (2012) penting untuk menguji kembali hubungan antara opini oleh BPK dengan tindak kriminal korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala pemerintahan lokal. Selanjutnya, Hasil penelitian Aghae (2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara korupsi dan kualitas pelaporan keuangan, mendemonstrasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik dapat mengurangi tingkat persepsi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya hasil penelitian oleh Liu (2021) menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas pelaporan keuangan dan indikator korupsi, khususnya Indeks Persepsi Korupsi, pengendalian korupsi, dan ukuran akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan, tingkat korupsi cenderung menurun. Aghae (2022) menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat mengurangi tingkat korupsi, penelitian ini berdasarkan premis bahwa informasi pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. Diharapkan 1 tingkat korupsi pemda yang menerima opini WTP lebih rendah dibandingkan pemda yang memiliki opini NON WTP. Berdasarkan logika berfikir dan hasil dari riset sebelumnya, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dan opini selain WTP.

Perbedaan E-Government antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP

Penerapan elektronik government yang biasa disebut E-Gov, merupakan suatu mekanisme interaksi terbaru antara pemerintah dengan komunitas sosial yang memiliki kepentingan, dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. E-Government diyakini sebagai salah satu cara yang ampuh dalam good governance. Penggunaan internet dalam pemerintahan telah diatur untuk mendukung pemerintahan agar bisa membangun serta mengembangkan website untuk

mempresentasikan informasinya kepada public (Pontoh, 2018). Dalam penelitian sebelumnya oleh Juniantika et al. (2020) mengenai Internet Financial Reporting (IFR) telah meneliti faktor yang berpengaruh terhadap IFR sebagai proksi E-Government. Metode yang digunakan adalah ukuran, manfaat, belanja modal, dan opini audit dari BPK RI. Hasilnya menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh pada IFR (E-Government), artinya terdapat perbedaan E-Government berdasarkan opini laporan keuangan. Selanjutnya menurut Wulandari dan Bandi (2015) menemukan bahwa penerapan E-Government berpengaruh positif signifikan terhadap opini pemeriksaan yang dikeluarkan BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan teknologi dapat meningkatkan opini. Demikian pula Novitasari et al. (2022) menyatakan Opini Audit berpengaruh positif terhadap penerapan E-Government. Demikian pula Bolívar et al. (2007) menyatakan pentingnya memanfaatkan teknologi E-Government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga diharapkan pemda yang memiliki opini WTP memiliki penerapan E-Government yang lebih baik. Berdasarkan logika berfikir dan hasil dari riset sebelumnya, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan penerapan E-Government antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan selain WTP.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021 hingga 2023 dan telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berjumlah 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota per tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, atau disebut juga Censur. Teknik sampling jenuh menurut Sekaran (2016) adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi yang relevan dalam penelitian diikutsertakan sebagai sampel. Sebelum melakukan uji beda, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui normalitas data, apakah data parametrik atau non parametrik. Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini menggunakan Independent T-test karena membandingkan pasangan data yang berbeda. Jika data normal (parametrik) maka uji beda menggunakan Independent T-test, namun jika data tidak normal (non parametrik) maka menggunakan uji mann whitney U test.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2021-2023. Total jumlah populasi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut sebanyak 1629 pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh, sehingga seluruh anggota dalam populasi dijadikan sampel penelitian.

Table 4. Hasil analisis statistik deskriptif uji beda

	N	Minimum	Maximum	Mean
KOR	1629	,00	171415,57	3464,0300
EGOV	1629	,00	4,5	2,169
Valid N	1629			

Berdasarkan hasil deskriptif statistic dari Table 4 diatas terdapat jumlah data korupsi, opini, EGovernment pada pemerintah daerah di Indonesia masing masing berjumlah 1629 sampel. Untuk data korupsi dari 1629 sampel pemerintah daerah di Indonesia terdapat nilai minimum 0, artinya tidak terdapat nilai kerugian negara. Nilai maksimum sebesar 171415,57 artinya nilai maksimum kerugian negara sebesar RP 171.415.570.000. pada Provinsi DKI Jakarta. Nilai rata rata untuk vatiabel korupsi atau kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia sebesar RP 3.464.030.000. Selanjutnya untuk data E-Government pada pemerintah daerah di Indonesia sebanyak 1629 sampel. Dari Table 4 terlihat nilai minimum E-Government sebesar 0, artinya tidak terdapat laporan SPBE pada daerah yang mendapatkan nilai 0. Nilai maksimum sebesar 4,5 pada Kabupaten Banyuwangi. Nilai rata rata untuk variabel E-Government sebesar 2,169. Nilai ini menunjukkan rata rata E-Government atau SPBE pada pemerintah daerah di Indonesia sebesar 2,169 nilai ini berada diantara level 1,8-<2,6 yang artinya cukup. Berdasarkan

hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data tidak normal maka uji beda menggunakan Mann Whitney U test.

Hasil Uji Statistik Hipotesis 1

Tabel 5. Pengujian Statistik dengan *Mann Whitney U test* Untuk Hipotesis 1

	OPN	N	Mean Rank	Sum of Ranks
KOR	WTP	1489	779,29	1160369,00
	NON WTP	140	1194,76	167266,00

T-Test	Keterangan	
Z	-9,991	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	H1 Didukung

Berdasarkan uji beda menggunakan Mann Whitney U test pada table diatas terdapat 1489 pemda yang mendapat opini WTP dan 140 pemda lainnya mendapat opini selain WTP. Terdapat perbedaan nilai korupsi antara pemda yang mendapat opini WTP dan selain WTP, secara signifikan. Dengan demikian maka Hipotesis 1 didukung. Perhitungan mean rank dilakukan untuk setiap kelompok korupsi berdasarkan opini. Rata-rata peringkat korupsi untuk WTP sebesar 779,29. Nilai ini lebih kecil dari rata rata peringkat korupsi untuk non WTP yaitu sebesar 1194,76. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata peringkat korupsi untuk opini WTP lebih kecil dari rata rata peringkat korupsi untuk pemda yang mendapatkan opini non WTP.

Hasil Uji Statistik Hipotesis 2

	OPN	N	Mean Rank	Sum of Ranks
SPBE	WTP	1489	839,12	1249456,50
	NON WTP	140	558,42	78178,50

T-Test	Keterangan	
Z	-6,754	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	H2 Didukung

Berdasarkan uji beda menggunakan Mann Whitney U test pada table diatas terdapat 1489 pemda yang mendapat opini WTP dan 140 lainnya yang mendapat opini selain WTP terdapat perbedaan nilai egov (SPBE) antara pemda yang mendapat opini WTP dan selain WTP secara signifikan. Dengan demikian maka Hipotesis 2 didukung.

Perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP

Berdasarkan output penelitian yang diperoleh diketahui bahwa terdapat 1489 pemerintah daerah yang mnedapat o 1 pini wtp dan 140 daerah yang mendapat opini non WTP (WDP, *Adverse, Disclaimer*). Nilai Asymp Sig sebesar 0,00 kurang dari 0,05 hal ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai korupsi yang signifikan antara pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dan non WTP. Perbedaan nilai korupsi berdasarkan opini laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari area yang sudah mendapatkan opini audit WTP cenderung memiliki nilai korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan area yang mendapatkan opini non WTP (WDP, *Adverse, Disclaimer*). Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan opini NON wtp memiliki nilai korupsi yang lebih tinggi. Opini audit yang baik dapat

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga berpotensi mengurangi tingkat korupsi. Publik mempertimbangkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK atas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut. maka dari itu jika hal tersebut benar adanya maka pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP oleh BPK seharusnya bebas dari masalah fraud atau korupsi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi selama lima tahun terakhir. Fenomena ini terjawab bahwa tingkat korupsi berbeda antara pemda berdasarkan opini yang diterima. Pemda yang mendapat opini non WTP memiliki tingkat korupsi yang lebih besar dibandingkan pemda yang mendapat opini WTP. Hasil penelitian ini juga mendukung Teori Agency bahwa pemda harus menyediakan laporan keuangan yang berkualitas atau opini WTP untuk dapat mengatasi masalah korupsi.

Penelitian ini memperoleh hasil yang sesuai dengan penelitian Yudi, et al. (2018), yaitu adanya korelasi yang signifikan antara tingkat korupsi di kalangan kepala daerah dan opini yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Provinsi dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi cenderung menerima opini BPK yang kurang baik, sehingga hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap persepsi kinerja keuangan. Senada dengan penelitian Liu (2021), Avis et al. (2018), Aghae (2022), Kuntadi et al. (2023) yang menyatakan bahwa opini laporan WTP memberikan kontribusi dan keterkaitan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Untuk kedepannya diharapkan dengan semakin banyaknya pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP akan semakin menurunkan tingkat korupsi.

Perbedaan E-Government antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dan Selain WTP

Berdasarkan uji beda menggunakan Mann Whitney U test terdapat 1489 pemerintah daerah yang mendapat opini wtp dan 140 daerah yang mendapat opini non WTP (WDP, Adverse, Disclaimer). Nilai Asymp Sig sebesar 0,00 kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan nilai egov (SPBE) yang signifikan antara pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dan non WTP. Perbedaan nilai E-Government berdasarkan opini laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari area yang mendapatkan opini audit WTP cenderung memiliki nilai E-Government yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan area yang mendapatkan opini audit kurang baik (WDP, Adverse, Disclaimer). Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan opini non WTP memiliki nilai E-Government yang lebih rendah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa pelaksanaan di Indonesia menunjukkan masih menunjukkan perkembangan yang belum baik, begitu pula opini LKPD dalam lima tahun terakhir masih ada pemda yang belum mendapatkan opini WTP. Hal ini terjawab dengan hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan penerapan E-Government antara pemda yang mendapat opini WTP dan non WTP. Penerapan E-Government lebih baik pada pemda yang memperoleh opini WTP dibandingkan pemda yang mendapatkan opini non WTP.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan output uji beda menggunakan Mann Whitney U test yang dilakukan, diperoleh hasil perbedaan yang signifikan pada tingkat korupsi dan E-Government antara pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dan NON WTP. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu Opini laporan keuangan, Korupsi, dan E-Government. Opini laporan keuangan menggunakan data opini laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dari tahun 2021-2023, sedangkan untuk korupsi menggunakan data kerugian negara dari tahun 2021-2023, dan untuk E-Government menggunakan data penilaian SPBE dari tahun 2021-2023. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Terdapat hasil perbedaan tingkat korupsi yang signifikan terhadap pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP. Pemerintah yang memiliki Opini WTP cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang memiliki Opini non WTP. Dengan Demikian hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan tingkat korupsi antara Pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP
2. Terdapat hasil perbedaan E-Government yang signifikan pada pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP, Pemerintah daerah yang memiliki opini WTP Cenderung memperoleh penilaian SPBE yang lebih tinggi atau E-Government yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki opini non WTP. Dengan Demikian hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan E-Government antara Pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP.

Keterbatasan Penelitian

Untuk variabel korupsi penelitian ini menggunakan proksi kerugian negara yang masih merupakan temuan BPK, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan pengukuran korupsi yang lain seperti data dari mahkamah agung atau kejaksaan agung yang mana data ini masih belum bisa untuk diperoleh hingga belum digunakan dalam penelitian ini. Karena data tersebut memiliki kesulitan dalam pengambilan data karena putusan dalam mahkamah agung terdiri dari beberapa tahun putusan yang tidak sesuai dengan periode pelaporan sehingga akan sulit untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tahunnya.

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain korupsi dan egov untuk menjelaskan perbedaan karakteristik pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dan non WTP
2. Penelitian ini telah menggunakan data seluruh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) selama tiga tahun (2021-2023), penelitian selanjutnya dapat melakukan klasterisasi populasi berdasarkan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk mendeskripsikan hasil yang lebih rinci.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi selain SPBE untuk mengukur *E-Government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2016). Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians. *Journal of Political Economy*, 126, 1912 - 1964. <https://doi.org/10.1086/699209>.
- Albrecht, C., Kranacher, M., & Albrecht, S. (2011). Asset Misappropriation Research White Paper for the Institute for Fraud Prevention.
- Budiman, Muhamad & Amyar, Firdaus. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. 7. 113-129. 10.28986/jtaken.v7i1.471.
- Bolívar, M., Pérez, C., & Hernández, A. (2007). *E-Government* and Public Financial Reporting The Case of Spanish Regional Governments. *The American Review of Public Administration*, 37, 142-177. <https://doi.org/10.1177/0275074006293193>.
- Cressey Andersen, E.S., & Jessen, S.A. (2003). Project Maturity in Organizations. *International Journal of Project Management*, Vol. 21, pp.457-461.
- Conover, W. J. (1999). *Practical NONparametric statistics*. John Wiley & Sons.
- Juniantika, Dhita & Hapsari, Dini. (2020). What Motivates Internet Financial Reporting in the Public Sector? Case of a Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*. 3. 102-116. 10.24815/jaroe.v3i2.17235.
- Pontoh, T., Grace., Yohanis, Rura., Abdul, Rahman., Muhammad, Achyar, Ibrahim. (2018). (7) Internet Financial Reporting Of Public Institutions and *E-Government* as a Medium of Good Governance in Indonesia. *Journal of Finance and Banking Review* doi: 10.35609/JFBR.2018.3.3(1)
- Indrajit, R. E. (2007). Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara. *Aptikom.z*
- Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Factors Affecting the Corruption Rate: Audit Opinion, Audit Findings, and Follow-up of Audit Results. *Journal of Accounting and Finance Management*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v4i1.189>.
- Kurniawati, A., & Pratama, Y. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>.
- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), 2021
- Mohaamad, ali, aghae., Javad, Rezazadeh., Morteza, Bayat. (2022). Investigating the Impact of Financial Reporting Quality on Corruption (Corruption Perceptions Index, Corruption Control and Accountability) in 8 Middle Eastern Countries. 125-98):12(6, حسابداری ارزشی و رفتاری. doi: 10.52547/aapc.6.12.98

- Novitasari, E., Dewi, F., & Oktavia, R. (2022). Determinants of E-Government Implementation in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1930656>
- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431-450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rini, Rini., Adhariani, Sarah. (2015). (1) Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Etikonomi*, doi: 10.15408/ETK.V13I1.1875
- Rodríguez-Navas, P. M., & Breijo, V. R. (2019). Evaluating and Fostering Transparency in Local Administrations. *Análise social*, 54(233 (4), 827-862.
- Rustiarini, N. W. (2019). The role of e-government in reducing corruption: A systematic review. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i3.8311>
- Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). Law , Development & Justice Review Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip- Law , Development & Justice Review. *Law, Development & Justice Review*, 5(3), 237-247.
- Ruki, T. (2012). *Korupsi tidak wajar tanpapengecualian*. Retrieved from:<http://www.dpd.go.id/artikel-korupsitidak-wajar-tanpa-pengecualian>.
- Sutopo, B., Wulandari, T., Adiati, A., & Saputra, D. (2017). E-Government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia. *The Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 11, 6-22. <https://doi.org/10.14453/AABFJ.V11I4.2..>
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2016) *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keterampilan*. Edisi ke-7, Wiley & Sons, West Sussex.
- Setyaningrum Irwansyah, Hidayati, T., & Hudayah, S. (2022). The effect of E-Government on local government performance accountability in Indonesia. *International journal of ebusiness and egovernment studies*, 14(2), 126-147.
- Tingting, Liu., Yu, Liu., Barkat, Ullah., Zuobao, Wei., Lixin, Colin, Xu. (2021). (6) The dark side of transparency in developing countries: The link between financial reporting practices and corruption. *Journal of Corporate Finance*, doi: 10.1016/J.JCORPFIN.2020.101829
- Tsutskiridze, Maksym & Bereza, Anatoliy. (2020). THE IMPACT OF E-GOVERNMENT ON THE LEVEL OF CORRUPTION. *Baltic Journal of Economic Studies*. 6. 93-99. 10.30525/2256-0742/2020-6-2-93-99.
- World Bank. (1996). Worldwide Governance Indicators. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal akuntansi dan Bisnis* , 15, 148-157. <https://doi.org/10.20961/JAB.V15I2.184>
- Yuniasih, Dwi, Astuti., Vid, Adrison. (2019). (4) The audit board of republic of Indonesia opinion and bribery in local governments in Indonesia. doi: 10.28986/JTAKEN.V5I2.379
- Yudi, Avalon, Idrus., Noer, Azam, Achsani., Arief, Tri, Hardiyanto. (2018). (12) THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (BPK) OPINION WITH REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT AND CORRUPTION. doi: 10.28986/JTAKEN.V4I1.168